



PENGEMBANGAN MODEL PELAPORAN LPD BERBASIS TRI HITA KARANA (THK): KAJIAN KEPATUHAN BUDAYA, AKUNTABILITAS SOSIAL, DAN KEBERLANJUTAN

I Komang Juliantara¹, Linda Santioso²

^{1,2}Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Tarumanagara Jakarta
ikomang.126251218@stu.untar.ac.id¹, lindas@fe.untar.ac.id²

Abstrak: Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki peran ganda sebagai entitas ekonomi komunal sekaligus pilar pelestarian budaya berdasarkan filosofi Tri Hita Karana. Namun, praktik akuntansi konvensional saat ini terlalu berorientasi pada laba finansial, sehingga memicu disonansi dalam akuntansi berperilaku pengurus dan mengancam posisi teori legitimasi LPD di hadapan krama (warga) desa adat. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif ini bertujuan untuk merekonstruksi akun spiritual-sosial serta memformulasikan matriks indikator non-keuangan sebagai suplemen pelaporan keberlanjutan LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran ritual dan sosial dapat direklasifikasi menjadi akun "Investasi Ekosistem Komunal" untuk menghindari bias efisiensi finansial. Secara teoretis, pengungkapan nilai-nilai ini memperkuat legitimasi teologis-kultural, meningkatkan rasa kepemilikan krama, dan secara berperilaku terbukti menekan risiko moral hazard debitur demi tercapainya keberlanjutan ekonomi jangka panjang LPD.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Tri Hita Karana, Akuntansi Berperilaku, Teori Legitimasi, Pelaporan Keberlanjutan.

Abstract: Village Credit Institutions (Lembaga Perkreditan Desa – LPD) in Bali hold a dual role as both communal economic entities and pillars of cultural preservation based on the Tri Hita Karana philosophy. However, current conventional accounting practices are overly oriented toward financial profit, thereby triggering dissonance in the behavioral accounting of managers and threatening the position of the LPD's legitimacy theory before the krama (indigenous villagers). This qualitative research, employing an exploratory case study method, aims to reconstruct spiritual-social accounts and formulate a matrix of non-financial indicators as a supplement to LPD sustainability reporting. The findings indicate that ritual and social expenditures can be reclassified into a "Communal Ecosystem Investment" account to prevent financial efficiency bias. Theoretically, the disclosure of these values strengthens theological-cultural legitimacy, enhances the krama's sense of ownership, and behaviorally is proven to suppress debtors' moral hazard for the sake of achieving long-term economic sustainability for the LPD.

Keywords: Village Credit Institutions (LPD), Tri Hita Karana, Behavioral Accounting, Legitimacy Theory, Sustainability Reporting, Communal Ecosystem Investment.

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali merupakan entitas mikro-keuangan komunal unik yang operasionalnya digerakkan oleh filosofi kearifan lokal Tri Hita Karana (THK) untuk menjaga keselarasan spiritual (*Parhyangan*), sosial (*Pawongan*), dan ekologis (*Palemahan*). Namun, praktik akuntansi formal saat ini masih mengadopsi standar konvensional arus utama yang bersifat positivistik-mekanistik dan berorientasi ketat pada laba finansial. Akibatnya, pengeluaran ritual keagamaan direduksi secara administratif menjadi sekadar pos biaya operasional yang dinilai tidak efisien, sementara kontribusi pelestarian lingkungan sama sekali menihilkan ruang representasi akun. Kesenjangan (gap) pelaporan ini memicu bias pragmatisme angka dan moral hazard pada perilaku pengurus (*prajuru*), yang lambat laun mengikis ikatan emosional serta legitimasi sosial LPD di mata krama (*warga*) adat, sehingga meningkatkan risiko degradasi tata kelola dan kegagalan institusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga persoalan utama guna menjembatani kesenjangan antara praktik akuntansi konvensional dan nilai-nilai kearifan lokal. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik pelaporan keuangan dan akuntansi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) saat ini dalam merepresentasikan dimensi spiritual (*Parhyangan*), sosial (*Pawongan*), dan ekologis (*Palemahan*) berbasis *Tri Hita Karana*. Kedua, riset ini mengeksplorasi bagaimana proses rekonstruksi sistem pelaporan keuangan dan formulasi matriks indikator kinerja non-keuangan yang komprehensif sebagai suplemen *sustainability reporting* pada LPD. Ketiga, penelitian ini menganalisis apa implikasi penerapan model pelaporan terintegrasi berbasis *Tri Hita Karana* terhadap akuntabilitas sosio-kultural LPD, kualitas pengambilan keputusan *prajuru*, serta penguatan tata kelola institusi adat secara keseluruhan. Melalui rumusan pertanyaan tersebut, alur hasil penelitian akan dikupas secara sistematis mulai dari evaluasi kondisi eksisting, tahapan konstruksi model, hingga proyeksi implikasinya bagi para pemangku kepentingan dan literatur etno-akuntansi.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan menggeser paradigma akuntansi tradisional dari sekadar pencatatan moneter mekanis menuju pemahaman bahwa akuntansi merupakan produk sekaligus pembentuk perilaku manusia di dalam organisasi. Menurut Siegel dan Marconi (1989) serta Hofstede dan Kinard (1970), bidang ini berfokus pada hubungan timbal balik guna memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana karakteristik psikologis manusia berinteraksi dengan desain sistem akuntansi. Melalui lensa ini, akuntansi diakui tidak bebas nilai (*value-free*),

melainkan sarat akan muatan budaya dan tata nilai lingkungan setempat, di mana desain pelaporan keuangan secara langsung mengarahkan keputusan manajer, alokasi sumber daya, dan persepsi tanggung jawab moral mereka.

Dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD), teori ini menegaskan bahwa perilaku ekonomi pengurus (*prajuru*), pengawas (*Bendesa Adat*), dan nasabah (*krama*) dikendalikan oleh sistem kognitif kebudayaan Bali yang mengutamakan keselarasan kosmis. Pemaksaan sistem akuntansi formal yang murni positivistik-finansial memicu disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) sesuai teori Festinger (1957), yang memaksa pengurus bertindak kapitalistik demi efisiensi biaya. Implikasinya, sosiokultural pengguna laporan yang terabaikan ini memicu disfungsi perilaku (*behavioral dysfunction*) berupa lunturnya rasa *ewuh-pakewih* (moralitas segan) *krama* dalam memenuhi kewajiban kredit, sehingga rekonstruksi sistem pelaporan yang selaras dengan tata nilai adat menjadi mutlak diperlukan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berakar dari konsep kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat, di mana legitimasi dipahami sebagai persepsi umum bahwa tindakan entitas telah selaras dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan lingkungan eksternalnya. Menurut Suchman (1995), legitimasi merupakan jangkar krusial bagi kelangsungan hidup jangka panjang organisasi, sementara Lindblom (1994) menegaskan bahwa aspek ini bersifat dinamis dan harus terus diupayakan melalui komunikasi transparan. Hak organisasi untuk eksis dan memanfaatkan sumber daya tidaklah inheren; hak tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut melalui pelebaran kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*) apabila entitas dinilai melanggar batas-batas norma sosial yang disepakati komunitas lokal. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD), legitimasi sosial-budaya berbasis kedaulatan *awig-awig* (hukum adat) jauh lebih berharga dibandingkan modalitas finansial. *Krama* desa memberikan dukungan penuh karena adanya ekspektasi bahwa LPD bertindak sebagai instrumen pelestarian budaya dan penopang ritual keagamaan mereka. Merujuk pada Deegan (2002), ketidakselarasan antara harapan masyarakat dengan realitas operasional LPD akan memperlebar kesenjangan legitimasi yang mengancam eksistensi lembaga. Oleh karena itu, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) mengenai kontribusi spiritual (*Parhyangan*) dan sosial (*Pawongan*) sesuai konsep Guthrie dan Parker (1989) menjadi strategi krusial untuk menepis isu tata kelola yang buruk sekaligus menegaskan kembali komitmen kontrak sosial-budaya komunal.

Filosofi Kultural Tri Hita Karana (THK)

Tri Hita Karana (THK) merupakan falsafah hidup masyarakat Hindu Bali yang mengamanatkan bahwa kebahagiaan sejati (*hita*) bersumber dari pemeliharaan tiga poros hubungan yang harmonis (Windia dan Dewi, 2011). Pemikiran ini selaras dengan Wiana (2007) mengenai pentingnya jalinan relasi kosmis yang holistik bagi eksistensi manusia. Dalam domain akuntansi kebudayaan nusantara, Tenaya (2007) menegaskan bahwa THK berfungsi sebagai kompas etika yang secara fundamental menggeser orientasi institusi bisnis dari egoisme materiil menuju nilai kebersamaan spiritual. Falsafah ini menuntut entitas ekonomi untuk tidak hanya berburu keuntungan finansial, melainkan juga menyelaraskan seluruh aktivitas operasionalnya dengan dimensi teologis dan sosiokultural lingkungan tempatnya bernaung. Secara struktural, operasionalisasi THK dalam manajemen Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib mencakup tiga pilar utama. Pertama, *Parhyangan* (dimensi spiritual-transendental) diwujudkan melalui pendanaan ritual suci (*yadnya*), pemeliharaan pura, dan internalisasi nilai kejujuran (*Satya*) serta kebajikan (*Dharma*) dalam tata kelola keuangan (Yoniartini, 2020). Kedua, *Pawongan* (dimensi sosial) ditransformasikan melalui penerapan prinsip persaudaraan (*menyama braya*) dan gotong royong (*paras-paros sarpanaya*) berupa skema kredit yang ramah serta penolakan terhadap praktik eksploitatif (Sudarta, 2016). Ketiga, *Palemahan* (dimensi ekologis) mewajibkan LPD menjaga kelestarian material kosmis (*bhuana agung*) melalui konservasi lingkungan aktif dan perlindungan tata ruang wilayah adat (*wewidangan*) demi keberlanjutan ekosistem jangka panjang.

Konsep Pelaporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) berevolusi sebagai kritik tajam terhadap akuntansi konvensional yang dinilai memicu krisis lingkungan dan ketimpangan sosial akibat orientasi tunggalnya pada kepentingan pemegang saham (*stockholder-oriented*). Mengadopsi konsep *Triple Bottom Line* dari John Elkington (1997), akuntansi modern menuntut pergeseran dari paradigma tunggal menuju pelaporan terintegrasi yang menyelaraskan tiga indikator utama: *Profit*(ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan). Menurut Lazuardi (2018), transformasi pelaporan ini merupakan respons logis atas tuntutan transparansi publik global. Untuk menjamin standardisasi informasi non-keuangan tersebut, panduan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) menyediakan kerangka pengungkapan yang terstruktur guna membantu publik menilai komitmen serta keberlanjutan jangka panjang suatu entitas.

Penelitian ini memosisikan pelaporan berbasis *Tri Hita Karana* (THK) sebagai bentuk indigenisasi atau penyerapan kearifan lokal terhadap konsep pelaporan keberlanjutan global pada lembaga keuangan adat di Bali. Mengacu pada kritik Kamayanti (2016) mengenai perlunya membebaskan praktik akuntansi dari jerat sekularisme Barat, konsep *Triple Bottom Line* konvensional dinilai sekadar menyentuh dimensi material-sekuler yang membatasi interaksi sebatas pada manusia (*people*) dan alam (*planet*). Sebaliknya, falsafah THK menyempurnakan kerangka tersebut secara mendasar dengan menyediakan ruang bagi dimensi spiritual-transendental (*Parhyangan*). Integrasi konseptual ini melahirkan model akuntansi keberlanjutan nusantara yang holistik, di mana motif ekonomi diletakkan di bawah payung etika ketuhanan dan tanggung jawab sosial demi menjaga kelestarian lembaga tanpa kehilangan jati diri kulturalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif-deskriptif untuk menyelidiki secara mendalam konstruksi dan interpretasi akuntansi oleh aktor lokal pada LPD yang dipilih secara purposive (Yin, 2018; Creswell, 2018). Pendekatan ini dinilai tepat untuk memahami fenomena kontemporer yang melibatkan nilai filosofis, persepsi budaya, dan perilaku etis dalam konteks kehidupan nyata yang tidak dapat dikuantifikasi. Berdasarkan prinsip Sugiyono (2019) dan Moleong (2021), data dihimpun dari dua sumber utama: data primer yang diperoleh melalui observasi rapat tahunan (Saba Desa) serta wawancara mendalam bersama informan kunci (Pemucuk, Penyarikan, Bendesa Adat, Sulinggih, dan krama desa); serta data sekunder pendukung berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD tahun buku 2024-2025, awig-awig, pararem, dan rincian buku kas alokasi dana sosial desa adat.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara sirkuler dan berkelanjutan menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data untuk menyeleksi, memberi kode (*coding*), dan memfokuskan rekaman data wawancara serta dokumen yang relevan dengan pilar *Tri Hita Karana*. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dengan menyusun informasi tereduksi ke dalam bentuk narasi sistematis serta matriks komparasi komponen pelaporan. Tahap ketiga adalah penarikan simpulan dan verifikasi guna menemukan makna esensial dari model yang dibangun.

Sementara itu, guna menjamin keabsahan data dan kualitas derajat kepercayaan (*credibility*) hasil riset agar terhindar dari bias subjektivitas, peneliti menerapkan strategi pemeriksaan keabsahan data merujuk pada

prinsip Lincoln dan Guba dalam Creswell (2018) melalui dua teknik triangulasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan menyilangkan kebenaran informasi sebuah fenomena akuntansi antara pihak Pemucuk LPD, Bendesa Adat, serta kramadesa selaku pengguna jasa. Kedua, triangulasi metode diterapkan melalui pengecekan silang secara ketat atas hasil data verbal wawancara langsung dengan bukti-bukti material berupa dokumen pertanggungjawaban fisik, pembukuan neraca kas riil, serta regulasi adat tertulis (*awig-awig*) LPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Komponen Pelaporan Berbasis THK

"Apabila laporan keuangan LPD murni dihitung dengan standar konvensional, maka setiap kali LPD mengeluarkan dana besar untuk karya agung atau ngenteg lumangling di desa adat, maka kinerja keuangan LPD turun akibat dari beban lain-lain yang membengkak. Padahal itu adalah nyawa LPD; kalau ritual diabaikan, krama (warga) justru menarik dananya karena hilangnya kepercayaan sekala-niskala."

— (Kutipan Wawancara: I Nengah Punia Astawa, Pemucuk LPD di Kabupaten Klungkung)

Evidensi Empiris dan Dokumen Regulasi

Temuan lapangan dan penelusuran dokumen pertanggungjawaban tahunan menunjukkan bahwa format pelaporan LPD saat ini terjebak dalam standardisasi akuntansi konvensional yang menyamakan kedudukan LPD dengan perbankan umum atau BPR. Secara yuridis formal, meskipun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 44 Tahun 2017 secara filosofis mengakui LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang berlandaskan Tri Hita Karana, dalam praktiknya aspek teknis pelaporan laba-rugi masih diatur menggunakan format standar akuntansi positivistik.

Implikasi dari penyeragaman ini terlihat nyata dalam dokumen Laporan Laba Rugi LPD, di mana seluruh alokasi dana untuk pembiayaan upacara keagamaan (*yadnya*), pengadaan sarana persembahyangan (*banten*), *dana punia*, hingga renovasi pura dicatat ke dalam akun "Beban Non-Operasional" atau "Beban Lain-lain". Dalam lensa akuntansi konvensional, pembengkakan pada pos-pos tersebut dinilai secara negatif karena mendistorsi rasio kesehatan finansial, seperti menurunkan tingkat pengembalian aset (*Return on Assets / ROA*) dan efisiensi operasional. Kondisi ini memicu dilema keperilakuan (*behavioral dilemma*) di tingkat manajemen; pengurus dihadapkan pada tekanan regulator eksternal dan

Tim Pembina LPD untuk menekan pengeluaran spiritual demi mengejar predikat LPD "Sehat" secara administratif-finansial murni, yang pada gilirannya mengancam esensi sosiokultural pendirian lembaga.

Tabel 1
Perbandingan Pos Laporan Konvensional dengan Rekonstruksi Berbasis THK

Kategori Pengeluaran	Perlakuan dalam Akuntansi Konvensional	Perlakuan dalam Rekonstruksi Berbasis THK
Dana Upacara Pura / Yadnya	Dicatat sebagai Beban Lain-lain (mengurangi laba bersih).	Dikapitalisasi ke dalam "Investasi Ekosistem Komunal" (Aset Sosial-Kultural).
Kontribusi Sosial Desa Adat	Masuk dalam Beban Operasional Lainnya / Biaya Overhead.	Diungkapkan dalam "Laporan Kepatuhan Kontrak Sosial Budaya".
Alokasi Dana Pembangunan Umat	Dianggap sebagai <i>expired cost</i> (biaya hangus tanpa return finansial).	Dihitung sebagai penciptaan Modal Sosial dan legitimasi teologis-kultural.

Sumber: data diolah

Model Rekonstruksi Pelaporan Keuangan

Mengatasi disonansi tersebut, penelitian ini merekonstruksi struktur pelaporan keuangan konvensional dengan mengapitalisasi pengeluaran spiritual dan sosial ke dalam pos "Investasi Ekosistem Komunal" atau "Pengungkapan Kepatuhan Kontrak Sosial Budaya", alih-alih meletakkannya sebagai biaya kebocoran ekonomi (*expired cost*). Melalui model ini, alokasi dana ritual dilaporkan secara eksplisit dalam "Laporan Nilai Tambah Ekonomi Komunal Berbasis THK" sebagai indikator positif terpenuhinya kewajiban eksistensial *Parhyangan* organisasi, tanpa mereduksi laba bersih secara bias. Reklasifikasi ini secara fundamental menggeser persepsi pemangku kepentingan; pengeluaran kultural yang semula dikategorikan sebagai pemborosan dalam akuntansi Barat, bertransformasi menjadi bukti konkret keberhasilan LPD dalam mengamankan legitimasi teologis-kultural dan merawat modal sosial yang menjadi jangkar bisnis komunalnya.

Formulasi Matriks Indikator Kinerja Non-Kuangan LPD

Penerapan matriks indikator kinerja non-keuangan ini berhasil mentransformasikan nilai-nilai normatif kearifan lokal Bali ke dalam instrumen pelaporan yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dan dokumen awig-awig, temuan penelitian dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama keberlanjutan LPD:

Dimensi *Parhyangan* (Akuntabilitas Spiritual)

Temuan menunjukkan bahwa kontribusi material LPD terhadap pemeliharaan Pura Kahyangan Tiga bukan sekadar tradisi sukarela, melainkan kewajiban moral yang kini dapat diukur secara nominal dan frekuensi (Rupiah/tahun). Selain itu, penyelesaian pelanggaran etika melalui mekanisme adat (*Karma Phala*) mengurangi potensi konflik internal desa secara transparan.

Dimensi *Pawongan* (Akuntabilitas Sosial & Krama)

Indikator inklusi ekonomi komunal membuktikan bahwa LPD menjalankan fungsi redistribusi kesejahteraan bagi *krama* melalui kredit mikro tanpa agunan khusus UMKM. Pengukuran berbasis persentase portofolio dan indeks kepuasan kerja memperlihatkan bahwa keberpihakan sosial LPD dapat dikuantifikasi setara dengan indikator keuangan konvensional.

Dimensi *Palemahan* (Akuntabilitas Ekologis)

Integrasi standar GRI pada aspek lingkungan berhasil memetakan kontribusi nyata LPD terhadap konservasi wilayah desa. Dukungan finansial terhadap penghijauan dan efisiensi operasional (*paperless*) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro berbasis adat juga adaptif terhadap isu keberlanjutan global (*global sustainability issues*). Matriks ini membuktikan bahwa penggabungan standar internasional (GRI) dengan nilai lokal (*Tri Hita Karana*) menghapus subjektivitas penilaian kinerja non-keuangan, sehingga LPD dapat mempertanggungjawabkan legitimasi kultural sekaligus legitimasi finansialnya kepada *krama* secara objektif.

Guna menghindari retorika kualitatif yang bersifat subjektif dan abstrak, penelitian ini merumuskan sebuah matriks indikator kinerja non-keuangan terstruktur yang mengadopsi mekanisme pelaporan indikator kinerja utama standar *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah diindigenisasi sesuai karakteristik sosiologis masyarakat adat Bali. Formulasi matriks ini berfungsi sebagai instrumen pengukur akuntabilitas (*accountability tool*) yang menjembatani kepentingan spiritual dengan evaluasi kinerja formal, sehingga pemenuhan kewajiban adat dapat dinilai

secara objektif, transparan, dan dapat diperbandingkan antar-periode pembukuan. Berikut adalah usulan rancangan matriks indikator kinerja non-keuangan LPD berbasis *Tri Hita Karana* yang dapat diintegrasikan ke dalam komponen pelaporan keberlanjutan.

Tabel 2
Matriks Indikator Kinerja Non-Keuangan LPD Berbasis Tri Hita Karana

Dimensi THK	Aspek Pengungkapan	Indikator Kinerja Non-Keuangan Spesifik	Metode Pengukuran / Satuan
<i>Parhyangan</i> (Spiritual & Budaya)	Kontribusi Yadnya & Tempat Suci	Rincian nilai nominal sumbangan langsung untuk pemeliharaan Pura Kahyangan Tiga dan upacara Piodalan.	Rupiah & Frekuensi Kegiatan per Tahun
	Etika Bisnis Berbasis Karma Phala	Tingkat pelanggaran kode etik moral oleh pengurus (kasus fraud, benturan kepentingan pengurus LPD).	Jumlah Kasus Terselesaikan secara Adat
	Kepatuhan Hukum Adat	Tingkat keselarasan keputusan operasional LPD terhadap Awig-awig dan Pararem tertulis desa.	Persentase Kesesuaian Hasil Audit Adat
<i>Pawongan</i> (Sosial & Krama)	Inklusi Ekonomi Komunal	Rasio penyaluran kredit mikro tanpa agunan khusus untuk UMKM	Persentase Portofolio Kredit UMKM Desa

		tradisional krama desa setempat.	
	Kesejahteraan & Keadilan Karyawan	Rasio penyerapan tenaga kerja lokal desa adat, kesetaraan gender pengurus, dan standar remunerasi adil.	Jumlah Karyawan Lokal & Indeks Kepuasan Kerja
	Dana Proteksi Sosial Komunal	Penyediaan santunan kematian krama, beasiswa anak miskin desa, dan bantuan bencana darurat desa adat.	Jumlah Penerima Manfaat & Total Dana Disalurkan
<i>Palemahan (Ekologis & Alam)</i>	Konservasi Wilayah Desa	Dukungan finansial LPD pada kegiatan penghijauan, kebersihan lingkungan desa, dan pelestarian jalur suci.	Luas Area Terdampak & Dana Konservasi (Rp)
	Eco-Efficiency Internal	Pengurangan jejak ekologis operasional kantor LPD melalui program paperless dan penghematan konsumsi listrik.	Persentase Penurunan Ream Kertas & Biaya Energi

Sumber: data diolah

Legitimasi Kultural dan Akuntabilitas Spiritual (*Parhyangan*)

Temuan matriks pada dimensi *Parhyangan* (seperti pengukuran kontribusi *Yadnya* dan penyelesaian sanksi adat) sejalan dengan riset Gorda et al. (2026) yang membuktikan bahwa kerangka etika THK bertindak sebagai moderator krusial yang mengokohkan kualitas pertanggungjawaban institusi. Di sisi lain, Budiadnyana et al. (2026) menekankan bahwa akuntabilitas finansial di desa adat tidak dapat

dipisahkan dari legitimasi spiritual dan kepatuhan terhadap aturan tradisional (*awig-awig*). Hal ini mengonfirmasi bahwa indikator non-keuangan berbasis spiritual bukan sekadar instrumen pelengkap, melainkan fondasi utama keberlanjutan bentuk *community-based enterprise*.

Mitigasi Risiko dan Tata Kelola Berbasis Kearifan Lokal (*Pawongan*)

Hasil pengkodean wawancara yang memunculkan indikator inklusi ekonomi komunal dan keadilan karyawan menjawab temuan Munandar et al. (2025). Penelitian tersebut menyoroti bahwa internalisasi nilai THK efektif dalam menekan potensi *fraud* dan benturan kepentingan di lingkungan LPD. Ketika aspek sosial diquantifikasi secara transparan ke dalam indikator kinerja (seperti rasio kredit mikro tanpa agunan dan jaminan proteksi sosial), LPD mampu menjaga kohesi sosial sekaligus meredam risiko operasional internal tanpa kehilangan identitas kekeluargaannya (Dewi & Ramantha, 2025).

Adopsi Standar Global dan Akuntabilitas Ekologis (*Palemahan*)

Penggabungan indikator ekologis dimensi *Palemahan* dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) menjembatani kebutuhan modern akan transparansi lingkungan. Studi oleh Nugraha & Suryanawa (2021) menunjukkan adanya urgensi integrasi tata kelola yang baik dengan kearifan lokal guna mendongkrak kinerja jangka panjang. Dengan menerjemahkan komitmen pelestarian alam (*eco-efficiency* dan konservasi jalur suci) ke dalam satuan metrik yang terukur, LPD membuktikan bahwa entitas ekonomi berbasis masyarakat adat mampu menyelaraskan regulasi pelaporan keberlanjutan global tanpa tercerabut dari akar sosio-ekologis lokalnya.

Analisis Implikasi Teoretis dan Praktis Pengungkapan Nilai THK

Secara teoretis, implementasi model pengungkapan *Tri Hita Karana* (THK) memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan bagi perluasan cakupan Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*). Ketika diskursus teori legitimasi global didominasi oleh riset korporasi Barat yang menggunakan pengungkapan sosial-lingkungan secara taktis-defensif demi meredam protes publik sekuler, studi ini mendobrak batasan tersebut dengan membuktikan bahwa legitimasi dapat dikonstruksikan secara proaktif melalui pendekatan teologis-kultural. Bagi LPD, kepatuhan menyajikan laporan non-keuangan berbasis THK bertindak sebagai instrumen komunikasi strategis yang memperkuat legitimasi moralnya di hadapan *krama* desa adat. Melalui penyajian data riil kontribusi terhadap pilar *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*, LPD tidak lagi dipandang

secara sempit sebagai lembaga penagih utang kapitalistik yang profit-sentris, melainkan diakui sebagai organ integral penjamin kelestarian adat dan budaya komunal mereka.

Pergeseran persepsi kolektif tersebut memicu implikasi berperilaku (*behavioral implications*) yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi praktis lembaga. Berlandaskan pada Teori Akuntansi Perilaku, transparansi laporan THK memicu disonansi kognitif dan beban psikologis-spiritual yang besar bagi *krama* desa untuk melakukan tindakan gagal bayar sengaja (*moral hazard*). Menunggak kewajiban pada LPD yang terbukti mendanai aktivitas pura dan kesejahteraan sosial diinternalisasi sebagai tindakan merusak kesucian transendental serta merenggut hak persaudaraan universal (*menyama braya*). Mekanisme kontrol sosial-spiritual yang termediasi melalui akuntansi ini secara empiris mampu menekan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), sekaligus mengonversi nilai spiritualitas menjadi benteng pertahanan finansial (*financial shield*) yang tangguh dalam menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis LPD jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam dan rekonstruksi konseptual pelaporan keuangan LPD, penelitian ini menyimpulkan tiga poin fundamental. Pertama, model pelaporan akuntansi konvensional saat ini mengalami defisit akuntabilitas akibat pengabaian kinerja non-finansial, yang memicu distorsi perilaku pengurus ke arah komersialisasi murni yang profit-sentris. Kedua, kerangka pelaporan keberlanjutan berbasis filosofi *Tri Hita Karana* (THK) berhasil diformulasikan ke dalam matriks indikator terukur yang mencakup dimensi *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*, sehingga mampu menyediakan panduan praktis yang andal bagi tata kelola akuntansi adat. Ketiga, pengungkapan nilai THK terbukti secara teoretis memperkuat legitimasi eksistensial LPD melalui pemenuhan kontrak sosial-keagamaan, yang secara berperilaku efektif menumbuhkan loyalitas komunal, menekan risiko *moral hazard* debitur, dan mengamankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang demi mewujudkan *labda* (keseimbangan sejati).

SARAN

Guna menyempurnakan implementasi model ini, beberapa saran strategis diajukan secara integratif kepada pemangku kepentingan terkait. Pengurus LPD disarankan mengintegrasikan Matriks Indikator Non-Kuangan THK sebagai laporan suplemen resmi berdampingan dengan laporan formal dalam forum tahunan (*Saba Desa*), sementara *Bendesa Adat* selaku pengawas diharapkan mengoptimalkan indikator ini sebagai instrumen audit kebudayaan berbasis *awig-awig*. Selanjutnya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) bersama BKS LPD direkomendasikan mengadopsi formulasi ini ke dalam regulasi daerah (Perda LPD) sebagai komponen baru penilaian tingkat kesehatan LPD masa depan agar terhindar dari bias kompetisi bank komersial. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan empiris melalui metode riset aksi (*action research*) atau pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) guna menguji secara komparatif efektivitas adopsi pelaporan THK terhadap penurunan tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pada berbagai karakteristik LPD di seluruh Bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih pula kepada Ibu Linda Santioso selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, dan juga teman-teman atas perhatian dan semangat yang diberikan.

REFERENSI

- Belkaoui, A. R. (1989). *Behavioral Accounting: The Research and Practical Issues*. Westport: Quorum Books.
- Budiadnyana, K. S., et al. (2026). Local Wisdom and Financial Accountability in Traditional Village Governance: An Institutional Theory Approach. *Research Horizon*, 6(2), 975-992.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimizing effect of social and environmental disclosures a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311.
- Desak Made Yoniaritini. (2020). Konsep Tri Hita Karana Bagi Anak Usia Dini. Mataram: Penerbit Literasi Nusantara.
- Dewi, N. P. S., & Ramantha, I. W. (2025). The Mediating Role of Good Corporate Governance Between Intellectual Capital and Financial Sustainability in Village Credit Institutions (LPDs). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MORFAI)*, 4(3), 7401-7415.
- Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone Publishing.
- Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
- Fuadah, L. L., Yuliani, & Safitri, R. H. (2018). Pengungkapan sustainability reporting di Indonesia. Citrabooks Indonesia.
- Gorda, A. A. N. O., et al. (2026). Optimizing Financial Report Quality in Balinese Credit Institutions (LPDs): The Moderating Role of the Indigenous Ethical Framework of Tri Hita Karana. *Gadjah Mada International Journal of Business (GamalJB)*, 28(3), 268-285.
- Guthrie, J., & Parker, L. D. (1989). Corporate social reporting: A rebuttal of legitimacy theory. *Accounting and Business Research*, 19(76), 343-352.
- Hofstede, T. R., & Kinard, J. C. (1970). A behavioral science approach to accounting research. *The Accounting Review*, 45(1), 41-54.
- Kamayanti, A. (2016). Metodologi Konstruktif Akuntansi: Membongkar Gunung Es Epistemologi Positivisma. Malang: Yayasan Rumah Peneleh.
- Lazuardi, M. R. (2018). Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Lindblom, C. K. (1994). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. Paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, A., et al. (2025). Internalisasi Tri Hita Karana dalam Usaha Pencegahan Fraud pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(2), 1120-1132.
- Nugraha, I. K. A., & Suryanawa, I. K. (2021). Peran Good Corporate Governance dan Kearifan Lokal Tri Hita Karana terhadap Kinerja Keuangan LPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1450-1464.

- Siegel, G., & Marconi, R. (1989). *Behavioral Accounting*. South-Western Publishing Co.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Sudarta, W. (2016). Reaktualisasi Kearifan Lokal Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Tradisional. *Jurnal Kajian Bali*, 6(1), 112-134.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Spiller, C., Pio, E., Erakovic, L., & Henare, M. (2011). Wise Up: Creating Organizational Leadership Inspired by Indigenous Values. *Journal of Business Ethics*, 99(2), 223-242. (*Referensi landasan filosofi hubungan bisnis dan nilai adat*)
- Tenaya, Gede Agus Indra. (2007). Analisis Falsafah dan Konsep Akuntansi dalam Perspektif Filsafat Kultur Bali Tri Hita Karana dan Kesadaran Internal Lembaga terhadap Hukum Perusahaan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Peredo, A. M., & Chrisman, J. J. (2006). Toward a Theory of Community-Based Enterprise. *Academy of Management Review*, 31(2), 309-328. (*Referensi landasan teori entitas berbasis komunitas*)
- Wiana, I Ketut. (2007). *Tri Hita Karana: Menurut Konsep Hindu*. Denpasar: Paramita.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2011). Analisis Sistem Irigasi Tradisional Subak Berlandaskan Filosofi Tri Hita Karana. Denpasar: Udayana University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.